



WALI KOTA PALU

Palu, 07 November 2023

Nomor :
Sifat : Segera
Lamp. : 3 (tiga) Lembar
Perihal : Permintaan Usulan Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Tahun 2025

Kepada
Yth. Pimpinan OPD Se- Kota Palu
di -
P a l u

Sehubungan dengan penyusunan Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Palu tahun 2025 melalui penerapan sistem aplikasi *SIPD*, maka diharapkan kepada saudara agar **segera** menyampaikan usulan Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja untuk tahun 2025 sesuai format yang dibagikan, dengan melampirkan bukti-bukti hasil survey harga barang minimal di tiga tempat/wilayah yang berbeda (nilai yang diusulkan sesuai harga yang ada di lapangan) dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Usulan ini disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Harga SIPD Pemerintah Kota Palu melalui Bidang Aset BPKAD Kota Palu selambat-lambatnya tanggal 30 November 2023, apabila sampai batas waktu yang ditentukan OPD tidak memasukkan data, maka usulan OPD akan diakomodir dalam pengusulan Standar Harga Perubahan Pemerintah Kota Palu Tahun 2025. Adapun ketentuan penyampaian data survey terdapat pada lampiran surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN I :

Keterangan :

1. Data hasil survey khusus untuk Standar Satuan Harga melampirkan minimal 3 (tiga) tempat/wilayah berbeda.
2. Data hasil survey untuk Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja melampirkan data hasil analisa dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bersangkutan/teknis.
3. Melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang menyatakan kebenaran data yang disampaikan OPD.
4. Setelah data hasil survey disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Harga SIPD Pemerintah Kota Palu melalui Bidang Aset BPKAD Kota Palu, kemudian akan dijadwalkan untuk OPD melakukan verifikasi hasil data survey dan akan dibuatkan Berita Acara Verifikasi Data oleh Tim Penyusun Standar Harga SIPD Pemerintah Kota Palu melalui Bidang Aset BPKAD Kota Palu.
5. Data usulan Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja untuk tahun 2025 diisi sesuai format dan dimasukkan dalam bentuk soft copy dan hard copy.

LAMPIRAN II :

(KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Nip :

Pangkat Golongan :

Jabatan :

Sebagai Pengguna Anggaran pada (Dinas / Badan / Kantor / Camat) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya Bertanggung Jawab Penuh terhadap kebenaran data Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Tahun 2025 yang kami usulkan, serta menyatakan bahwa proses usulan yang kami ajukan telah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Demikian Surat Keterangan Tanggung Jawab ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 2023

Kepala Dinas / Badan / Kantor / Camat

Materai
Rp. 10.000

.....
NIP.

LAMPIRAN III :

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Rekening 1	Rekening 2	Rekening 3	Rekening 4	Rekening 5	Rekening 6	Rekening 7	Rekening 8	Rekening 9	Rekening 10	Kelompok	Nilai TKDN
1.1.12.01.01.0001	Aspal Curah	kg	13840	5.1.02.01.01.0001											
1.1.12.01.01.0001	Aspal Drum 155 kg	kg	2545200	5.1.02.01.01.0001											
1.1.12.01.01.0001	Aspal Minyak	kg	18613	5.1.02.01.01.0001											

FORMAT INI DI GUNAKAN UNTUK MENGGUNGAH DATA SSH, HSPK, ASB, DAN SBU

KETERANGAN KOLOM

A. KODE BARANG SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 050 - 5889 TAHUN 2021

B. URAIAN ADALAH NAMA BARANG, JASA, ATAU PEKERJAAN (MAKSIMAL 255 KARAKTER)

C. SPESIFIKASI BARANG, JASA, ATAU PEKERJAAN DISARANKAN BERSIFAT UMUM (MAKSIMAL 255 KARAKTER)

D. SATUAN BARANG, JASA, ATAU PEKERJAAN AGAR MENGGUNAKAN SATUAN BAKU (BUKAN PAKET, LS, ATAU SEJENISNYA)

E. HARGA SATUAN DIHITUNG TANPA PAJAK PPN DAN DI INPUT TANPA TANDA BACA

KOLOM F S/D O DIISI KODE REKENING SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 050 - 5889 TAHUN 2021

P. KELOMPOK DIISI ANGKA: 1 UNTUK SSH, 2 UNTUK HSPK, 3 UNTUK ASB, DAN 4 UNTUK SBU

Q. NILAI TKDN MINIMAL 25